

ABSTRAK

Pandemi covid-19 menyebabkan pelaku usaha mikro mengalami kesulitan finansial sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang salah satu agendanya adalah memberikan bantuan kepada usaha mikro. Kebijakan tersebut adalah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atau kebijakan pemberian BPUM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari kebijakan pemerintah untuk membantu usaha mikro tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Peneliti mengkaji implementasi pelaksanaan BPUM bagi pelaku usaha mikro berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya di dalam praktiknya di masyarakat dengan memadukan data ataupun fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian. Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dari kebijakan BPUM tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan walaupun dalam pelaksanaannya terdapat perubahan pelaksanaan akibat adanya perubahan ketentuan. Pelaksanaan kebijakan BPUM sudah dilaksanakan secara transparan, *monitoring* dan evaluasi sudah dilaksanakan langsung di lapangan, dan pengawasannya sudah dilakukan dengan baik secara internal maupun eksternal, selain itu kebijakan BPUM dapat menghasilkan banyak pencapaian yakni meningkatnya kesejahteraan usaha mikro karena BPUM berdampak baik sehingga banyak usaha mikro dapat bertahan di masa pandemi covid-19. Pelaksanaan kebijakan BPUM tersebut walaupun sudah memiliki banyak pencapaian namun pada kenyataannya belum tersalurkan secara tepat sasaran, selain itu juga keterbatasan data menghambat penyaluran BPUM.

Kata Kunci: BPUM, Covid-19, Usaha Mikro

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has caused micro-enterprises to experience financial difficulties, so the government has issued a national economic recovery policy, one of which is to provide assistance to micro-enterprises. The policy is the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 6 of 2020 concerning General Guidelines for the Distribution of Government Assistance for Micro-Enterprises to Support National Economic Recovery in the Context of Facing Threats That Endanger the National Economy and Rescue the National Economy in The Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic period or the policy of providing BPUM. The purpose of this research is to find out how the implementation of government policies to help these micro-enterprises.

The research method used is the empirical juridical method. Researchers examine the implementation of BPUM for micro-enterprises based on laws and regulations and their implementing regulations in practice in the community by combining data or facts obtained from research. The research specification used by the author is descriptive analytical. The data collection method used is primary data and secondary data as well as data processing and analysis in this study was carried out by qualitative analysis methods.

The results of the study indicate that the implementation of the BPUM policy has been implemented in accordance with the provisions that have been set, although in its implementation there are changes in implementation due to changes in provisions. The implementation of the BPUM policy has been carried out transparently, monitoring and evaluation have been carried out directly in the field, and the supervision has been carried out both internally and externally, besides the BPUM policy can produce many achievements, namely increasing the welfare of micro-enterprises because BPUM has a good impact so that many micro-enterprises can survive during the covid-19 pandemic. The implementation of the BPUM policy, although it has had many achievements, has in fact not been channeled on target, besides that limited data has hampered the distribution of BPUM.

Keywords: BPUM, Covid-19, Micro-Enterprises